



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Arsip yang dimiliki Daerah merupakan sumber informasi dan bahan pertanggung jawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, berguna untuk menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem Kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan Kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar Kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka penyelenggaraan Kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan Kearsipan yang komprehensif dan terpadu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kepala Dinas

Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Konawe Kepulauan.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
12. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
13. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus-menerus.
14. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
15. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga Kearsipan.
16. Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
17. Arsip Umum adalah Arsip yang tidak termasuk dalam kategori Arsip Terjaga.
18. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.
19. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk

mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.

20. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan Kearsipan.
21. Arsip Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga Kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang Kearsipan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.
22. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
23. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip dilingkungannya.
24. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan.
25. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi paling sedikit mengenai jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
26. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga Kearsipan.
27. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan Kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber dayalainnya.
28. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan Arsip.
29. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip Statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu Sistem Kearsipan Nasional.

30. Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah Arsip Statis pada lembaga Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan Arsip Statis dan hak pengelolaannya dari Pencipta Arsip kepada lembaga Kearsipan.
31. Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan Kearsipan secara nasional.
32. Sistem Kearsipan Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disingkat SKK adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
33. Sistem Informasi Kearsipan Kabupaten Konawe Kepulauan, yang selanjutnya disingkat SIKK adalah Sistem Informasi Arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Konawe Kepulauan yang menggunakan Sarana Jaringan Informasi Kearsipan Kabupaten Konawe Kepulauan.
34. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
35. Jaringan Informasi Kearsipan Kabupaten Konawe Kepulauan, yang disingkat JIKK Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Sistem Jaringan Informasi dan Sarana Pelayanan Arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Konawe Kepulauan.
36. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi Arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga Kearsipan dan dicari oleh lembaga Kearsipan serta diumumkan kepada publik.
37. Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya.
38. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip

bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.

39. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
40. Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan Arsip Vital Pencipta Arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah.
41. Sumber Daya Kearsipan adalah dukungan terhadap sistem Kearsipan nasional berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, organisasi Kearsipan dan pendanaan.
42. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kearsipan Daerah menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip secara komprehensif dan terpadu dalam SKK.
- (2) Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan kebijakan;
 - b. pembinaan Kearsipan; dan
 - c. pengelolaan Arsip.
- (3) Penyelenggaraan Kearsipan dalam SKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), didukung sumber daya Kearsipan meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 3

- (1) SKK wajib diselenggarakan oleh Pencipta Arsip dan Dinas Perpustakaan dan Arsip.

- (2) Penyelenggaraan SKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab masing-masing Pencipta Arsip dan Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- (3) Penyelenggaraan SKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sinergi dengan SKN dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN KEBIJAKAN KEARSIPAN

Pasal 4

- (1) Penetapan kebijakan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. pembinaan;
 - b. pengelolaan Arsip;
 - c. pembangunan SKK, pembangunan SIKK dan JIKK di wilayah Daerah;
 - d. organisasi;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. prasarana dan sarana;
 - g. perlindungan dan penyelamatan Arsip;
 - h. sosialisasi Kearsipan;
 - i. kerjasama; dan
 - j. pendanaan.
- (3) Kebijakan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan bagi Pencipta Arsip dan Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam penyelenggaraan Kearsipan.

Pasal 5

Penetapan kebijakan dibidang pembinaan dan pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, dimaksudkan untuk mengatur standar dan kendali mutu terhadap pengelolaan dan pembinaan Kearsipan.

Pasal 6

Penetapan kebijakan dibidang pembangunan SKK, SIKK dan pembentukan

JIKK di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk menata penyelenggaraan Kearsipan Daerah dalam kesatuan Sistem Kearsipan Nasional.

Pasal 7

Penetapan kebijakan dibidang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk mengatur standar fungsi, kendali mutu dan meningkatkan kapasitas Unit Kearsipan dan kelembagaan.

Pasal 8

Penetapan kebijakan dibidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk mengatur kompetensi, profesionalisme dan kinerja Kearsipan.

Pasal 9

Penetapan kebijakan dibidang prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk mengatur standar dan kendali mutu terhadap prasarana dan sarana dalam pengelolaan Kearsipan.

Pasal 10

Penetapan kebijakan dibidang perlindungan dan penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dimaksudkan untuk mengatur kriteria, tanggungjawab dan strategi terhadap perlindungan dan penyelamatan Arsip.

Pasal 11

Penetapan kebijakan dibidang sosialisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, dimaksudkan untuk mengatur strategi pencapaian visi dan misi penyelenggaraan Kearsipan.

Pasal 12

Penetapan kebijakan dibidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, dimaksudkan untuk mengatur prinsip-prinsip kerjasama.

Pasal 13

Penetapan kebijakan dibidang pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j, dimaksudkan untuk mengatur dan menetapkan program

dibidang penyelenggaraan Kearsipan.

BAB IV PENGELOLAAN ARSIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Arsip dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan keselamatan Arsip yang autentik, utuh dan terpercaya dalam rangka SKK dengan didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengelolaan Arsip dilakukan terhadap:
 - a. Arsip Dinamis; dan
 - b. Arsip Statis.
- (3) Pengelolaan Arsip Dinamis menjadi tanggungjawab Pencipta Arsip dan dilaksanakan oleh unit-Unit Kearsipan.
- (4) Pengelolaan Arsip Statis menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- (5) Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pencipta Arsip dan pengelola Arsip Statis dilaksanakan Arsiparis.
- (6) Dalam melaksanakan pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis, Arsiparis dibantu oleh tenaga yang memiliki pengetahuan di bidang Kearsipan.

Bagian Kedua Pengelolaan Arsip Dinamis

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. Penciptaan Arsip;
 - b. penggunaan Arsip;

- c. pemeliharaan Arsip;
 - d. penyusutan Arsip.
- (2) Arsip Dinamis terdiri atas:
- a. Arsip Aktif;
 - b. Arsip Inaktif; dan
 - c. Arsip Vital.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pengelolaan Arsip Dinamis diperlukan:
- a. tata naskah dinas;
 - b. klasifikasi Arsip;
 - c. JRA; dan
 - d. sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip.
- (2) Tata naskah dinas, klasifikasi Arsip, JRA dan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata naskah dinas, klasifikasi Arsip, JRA dan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip pada Pencipta Arsip diluar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tata naskah dinas mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- (2) Tata naskah dinas digunakan untuk memenuhi autentisitas dan reliabilitas Arsip.

Pasal 18

- (1) Klasifikasi disusun berdasarkan pada analisis fungsi dan tugas Pencipta Arsip yang disusun secara logis, sistematis dan kronologis.
- (2) Klasifikasi Arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan, penataan dan mendukung akses, pemanfaatan Arsip serta penyusutan Arsip.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD wajib memiliki JRA.
- (2) JRA digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.

- (3) JRA pada Pemerintah Daerah disusun oleh masing-masing pimpinan Pencipta Arsip yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- (4) JRA pada BUMD disusun oleh masing-masing pimpinan BUMD yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- (5) JRA terdiri atas JRA fasilitatif dan JRA substantif.
- (6) Penentuan retensi Arsip pada JRA fasilitatif atau JRA substantif mengacu pada pedoman retensi Arsip fasilitatif atau pedoman retensi Arsip substantif.

Pasal 20

Dinas Perpustakaan dan Arsip melakukan asistensi dan bimbingan penyusunan JRA kepada Pencipta Arsip berdasarkan pedoman penyusunan JRA.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Klasifikasi keamanan dan akses Arsip disusun sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka penggunaan Arsip dan informasinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2

Unit Kearsipan

Pasal 23

- (1) Unit Kearsipan wajib dibentuk pada setiap Pencipta Arsip.
- (2) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang meliputi:
 - a. Unit Kearsipan I dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip; dan
 - b. Unit Kearsipan II dilaksanakan oleh sekretariat/bagian yang menangani urusan tata usaha pada SKPD dan BUMD.
- (3) Dinas Perpustakaan dan Arsip selain berfungsi sebagai Unit Kearsipan I, juga berfungsi sebagai Unit Kearsipan II selaku Pencipta Arsip.

Pasal 24

- (1) Unit Kearsipan II mengelola Arsip Inaktif dari unit Pengolah.
- (2) Unit Pengolah mempunyai tugas:
 - a. penciptaan Arsip;
 - b. pemberkasan Arsip Aktif;
 - c. pengelolaan, penyimpanan dan penyajian Arsip Aktif;
 - d. pengelolaan Arsip Vital;
 - e. pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan.
- (3) Unit Pengolah melaporkan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Arsip Aktif kepada pimpinan Pencipta Arsip melalui Unit Kearsipan II.
- (4) Pengelolaan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit Pengolah dan dilaksanakan oleh Arsiparis atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Unit Kearsipan II memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif dari unit Pengolah di lingkungannya;
 - b. mengolah Arsip dan menyajikan Arsip menjadi informasi dalam rangka SKK dan SIKK;
 - c. melaksanakan pemusnahan Arsip di instansinya.
- (2) Unit Kearsipan II memiliki fungsi:
 - a. pengolahan Arsip Inaktif dari unit Pengolah di lingkungannya;
 - b. pengolahan Arsip dan penyajian Arsip menjadi informasi;
 - c. pemusnahan Arsip di lingkungan instansinya;
 - d. penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - e. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan Kearsipan dilingkungannya.

Pasal 26

Unit Kearsipan dipimpin oleh seorang pejabat struktural yang memiliki kompetensi dibidang k Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan.

Paragraf 3
Penciptaan Arsip

Pasal 27

- (1) Penciptaan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Penciptaan Arsip meliputi kegiatan mengatur dan mendokumentasikan proses:
 - a. pembuatan Arsip; dan
 - b. penerimaan Arsip.
- (3) Pembuatan Arsip dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas untuk memenuhi autentitas dan reliabilitas Arsip.
- (4) Pembuatan Arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi Arsip untuk mengelompokkan Arsip sebagai satu keutuhan informasi.
- (5) Pembuatan Arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses Dinamis untuk menentukan keterbukaan atau kerahasiaan Arsip dalam rangka penggunaan Arsip dan informasinya.
- (6) Pembuatan Arsip harus di dokumentasikan dengan cara diregistrasi.
- (7) Pendokumentasian pembuat Arsip dilakukan oleh Arsiparis.

Pasal 28

- (1) Arsip yang sudah diregistrasi harus didistribusikan kepada pihak yang berhak secara cepat, tepat, lengkap dan aman.
- (2) Unit Pengolah dan Unit Kearsipan II bertanggung jawab terhadap pengendalian Arsip yang didistribusikan sesuai kewenangannya.
- (3) Pendistribusian diikuti dengan tindakan pengendalian.

Pasal 29

- (1) Penerimaan Arsip wajib dilakukan oleh petugas yang berhak menerima.
- (2) Penerimaan Arsip harus didokumentasikan.
- (3) Pendokumentasian Arsip dilakukan dengan cara registrasi.
- (4) Pendokumentasian Arsip penerimaan Arsip dilakukan oleh Arsiparis.
- (5) Arsip yang telah di dokumentasikan Arsip wajib dipelihara dan disimpan.

Paragraf 4
Penggunaan Arsip Dinamis

Pasal 30

- (1) Penggunaan Arsip Dinamis diperuntukan bagi kepentingan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Ketersediaan dan autentisitas Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.
- (3) Pimpinan unit Pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan autentisitas Arsip aktif.
- (4) Pimpinan Unit Kearsipan II bertanggung jawab terhadap ketersediaan Arsip Inaktif untuk kepentingan penggunaan internal Pencipta Arsip dan kepentingan publik, serta penggunaan informasi Arsip dalam SIKK dan JIKK.
- (5) Penyediaan Arsip untuk kepentingan akses Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab kepala Unit Kearsipan II dan dilaksanakan oleh Arsiparis.
- (6) Penggunaan Arsip dilaksanakan sesuai dengan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip.
- (7) Mekanisme penggunaan Arsip dan informasi Arsip Dinamis oleh pengguna dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemeliharaan Arsip Dinamis

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan Arsip Dinamis dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip.
- (2) Pemeliharaan Arsip Dinamis meliputi:
 - a. pemeliharaan Arsip Aktif;
 - b. pemeliharaan Arsip Inaktif; dan
 - c. pemeliharaan Arsip Vital.
- (3) Pemeliharaan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit Pengolah.
- (4) Pemeliharaan Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab kepala Unit Kearsipan II.
- (5) Pemeliharaan Arsip Vital dilaksanakan berdasarkan program Arsip Vital.

- (6) Pemeliharaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberkasan;
 - b. penataan; dan
 - c. penyimpanan.

Pasal 32

- (1) Pemeliharaan Arsip Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), pada Pemerintah Daerah dan BUMD diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip.
- (2) Program Arsip Vital dilaksanakan dalam satu kesatuan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana.
- (3) Program Arsip Vital menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip.
- (4) Program Arsip Vital dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi;
 - b. perlindungan dan pengamanan; dan
 - c. penyelamatan dan pemulihan

Pasal 33

- (1) Pemberkasan Arsip dilakukan setelah Arsip diregistrasi dan didistribusikan.
- (2) Arsip yang telah dilakukan pemberkasan Arsip dinyatakan sebagai Arsip Aktif berdasarkan klasifikasi Arsip.
- (3) Pemberkasan Arsip Aktif pada unit pengolah menghasilkan tersusunnya daftar Arsip Aktif.
- (4) Daftar Arsip Aktif terdiri atas:
 - a. daftar berkas; dan
 - b. daftar isi berkas.
- (5) Daftar berkas paling sedikit memuat metadata:
 - a. unit Pengolah;
 - b. nomor berkas;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi berkas;
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah; dan
 - g. keterangan.

- (6) Daftar isi berkas paling sedikit memuat metadata:
 - a. nomor berkas;
 - b. nomor item Arsip;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi Arsip;
 - e. tanggal;
 - f. jumlah; dan
 - g. keterangan.
- (7) Pemberkasan Arsip Aktif dan pembuatan daftar Arsip Aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit Pengolah dan dilaksanakan oleh Arsiparis.
- (8) Daftar Arsip Aktif disampaikan kepada Unit Kearsipan dalam rangka penyelenggaraan SIKK dan JIKK.

Pasal 34

- (1) Penataan Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan berdasarkan asas asal- usul dan asas aturan asli serta dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengaturan fisik Arsip;
 - b. pengolahan informasi Arsip; dan
 - c. penyusunan daftar Arsip Inaktif.
- (2) Daftar Arsip Inaktif paling sedikit memuat metadata:
 - a. Pencipta Arsip;
 - b. unitpengolah;
 - c. nomorArsip;
 - d. kode klasifikasi;
 - e. uraian informasi Arsip;
 - f. kurun waktu;
 - g. jumlah; dan
 - h. keterangan.
- (3) Penataan Arsip Inaktif dan pembuatan daftar Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab kepala Unit Kearsipan II dan dilaksanakan oleh Arsiparis.
- (4) Daftar Arsip Inaktif disampaikan kepada Unit Kearsipan II dalam rangka SIKK dan JIKK.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD membuat daftar Arsip Dinamis berdasarkan 2 (dua) katagori, yaitu:
 - a. Arsip Terjaga; dan
 - b. Arsip Umum.
- (2) Daftar isi Arsip Dinamis meliputi:
 - a. daftar Arsip Aktif; dan
 - b. daftar Arsip Inaktif.

Paragraf 6

Penyimpanan Arsip

Pasal 36

- (1) Penyimpanan Arsip dilakukan terhadap Arsip Aktif dan inaktif yang sudah didaftarkan dalam daftar Arsip.
- (2) Penyimpanan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit Pengolah dan dilaksanakan oleh Arsiparis.
- (3) Penyimpanan Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab kepala Unit Kearsipan II dan dilaksanakan oleh Arsiparis.
- (4) Penyimpanan Arsip Aktif dan inaktif dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi Arsip selama jangka waktu penyimpanan Arsip berdasarkan JRA.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penggunaan dan pemeliharaan Arsip Dinamis dapat dilakukan alih media Arsip.
- (2) Alih media Arsip dilaksanakan dalam bentuk apapun sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pencipta Arsip membuat kebijakan alih media Arsip meliputi:
 - a. pengkopian;
 - b. konversi; dan
 - c. migrasi.
- (4) Arsip yang dialih mediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Alih media dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi Arsip; dan

- b. nilai informasi.
- (6) Alih media Arsip dilegalisasi dengan autentikasi oleh pimpinan di lingkungan Pencipta Arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Arsip hasil alihmedia.
 - (7) Pelaksanaan alih media dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar Arsip.
 - (8) Berita acara alih media Arsip Dinamis paling sedikit memuat:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat pelaksanaan;
 - c. jenismedia;
 - d. jumlah Arsip;
 - e. keterangan proses alih media yangdilakukan;
 - f. pelaksanaan; dan
 - g. penandatanganan oleh pimpinan unit Pengolah dan Unit Kearsipan.
 - (9) Daftar Arsip Aktif dan Arsip Inaktif yang dialih mediakan paling sedikit memuat:
 - a. nomor urut;
 - b. jenis Arsip;
 - c. jumlah Arsip;
 - d. kurun waktu; dan
 - e. keterangan.
 - (10) Pimpinan Unit Kearsipan II melaporkan pelaksanaan alih media Arsip Aktif dan Arsip Inaktif kepada pimpinan Pencipta Arsip.
 - (11) Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Paragraf 7

Penyusutan Arsip

Pasal 38

- (1) Penyusutan Arsip Dinamis dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA.
- (2) Penyusutan Arsip meliputi kegiatan:
 - a. pemindahan Arsip Inaktif dari unit Pengolah ke Unit Kearsipan II;
 - b. pemusnahan Arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan; dan
 - c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Paragraf 8
Pemindahan Arsip Inaktif

Pasal 39

- (1) Pemindahan Arsip Inaktif dari unit Pengolah ke Unit Kearsipan II yang berada pada Pencipta Arsip menjadi tanggung jawab pimpinan unit Pengolah.
- (2) Pemindahan Arsip Inaktif dari unit Pengolah ke Unit Kearsipan II dilaksanakan setelah melewati jangka waktu retensi aktifnya.
- (3) Pelaksanaan pemindahan Arsip Inaktif dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan dilampiri daftar Arsip yang dipindahkan.
- (4) Berita acara pemindahan Arsip Inaktif ditandatangani oleh pimpinan unit Pengolah dan pimpinan Unit Kearsipan II.
- (5) Pemindahan Arsip Inaktif di lingkungan Pencipta Arsip dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media Arsip melalui kegiatan:
 - a. penyeleksian Arsip Inaktif;
 - b. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan meliputi daftar berkas dan daftar isi berkas; dan
 - c. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan.

Pasal 40

- (1) Pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari unit Pengolah ke Unit Kearsipan II.
- (2) Pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dipindahkan dari Unit Kearsipan II ke Unit Kearsipan I.

Paragraf 9
Pemusnahan Arsip

Pasal 41

- (1) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, pada Pencipta Arsip menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip.
- (2) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Arsip yang:
 - a. tidak memiliki nilai guna;
 - b. telah habis masa retensinya dan berketerangan musnah berdasarkan

JRA;

- c. tidak ada undang-undang yang melarang; dan
 - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara atau masih diperlukan untuk barang bukti suatu sengketa yang sedang berlangsung.
- (3) Dalam hal Arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retensinya ditentukan kembali oleh pimpinan Pencipta Arsip.

Pasal 42

Prosedur pemusnahan Arsip berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. pembentukan panitia penilai Arsip;
- b. penyeleksian Arsip berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (5) huruf a;
- c. pembuatan daftar Arsip usul musnah oleh Arsiparis di Unit Kearsipan II;
- d. penilaian oleh panitia penilai Arsip;
- e. permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip;
- f. penetapan Arsip yang akan dimusnahkan; dan
- g. pelaksanaan pemusnahan:
 - 1. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi Arsip musnah dan tidak dapat dikenali;
 - 2. disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) pejabat dari unsur bagian hukum dan unsur inspektorat; dan
 - 3. disertai penandatanganan berita acara yang memuat data Arsip yang dimusnahkan.

Pasal 43

- (1) Pembentukan panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, ditetapkan oleh:
- a. pimpinan SKPD dan BUMD untuk pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun; atau
 - b. kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk pemusnahan Arsip yang memiliki retensi sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan penilaian Arsip yang akan dimusnahkan.
- (3) Panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memenuhi unsur:

- a. pimpinan Unit Kearsipan II sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. pimpinan unit Pengolah yang Arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
 - c. Arsiparis sebagai anggota.
- (4) Panitia penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi unsur:
- a. pimpinan Unit Kearsipan I sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. pimpinan Unit Kearsipan II yang Arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota;
 - c. pimpinan unit Pengolah yang Arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
 - d. Arsiparis sebagai anggota.

Pasal 44

- (1) Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun pada SKPD dan BUMD dilaksanakan oleh pimpinan SKPD dan BUMD setelah mendapat:
 - a. penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip usul musnah oleh Arsiparis di Unit Kearsipan II;
 - b. pertimbangan tertulis dari panitia penilai Arsip;
 - c. pertimbangan dari pimpinan unit Pengolah;
 - d. penetapan Arsip yang akan dimusnahkan oleh pimpinan Pencipta Arsip;
 - e. persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab SKPD dan BUMD.
- (3) Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada SKPD dan BUMD dilaksanakan oleh pimpinan SKPD dan BUMD setelah mendapat:
 - a. penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip usul musnah oleh Arsiparis di Unit Kearsipan I;
 - b. pertimbangan tertulis dari panitia penilai Arsip;
 - c. pertimbangan dari pimpinan unit Pengolah yang Arsipnya akan dimusnahkan;
 - d. persetujuan dan penetapan dari Kepala ANRI;
 - e. persetujuan tertulis dari Bupati; dan
 - f. persetujuan tertulis dari Kepala ANRI;

- (4) Pencipta Arsip wajib menyimpan Arsip yang tercipta atas pelaksanaan kegiatan pemusnahan Arsip sebagai Arsip Vital yang meliputi:
 - a. keputusan pembentukan Panitia Penilai Arsip;
 - b. notulen rapat Panitia Penilai Arsip pada saat melakukan penilaian;
 - c. usulan dari Panitia Penilai Arsip mengenai Arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
 - d. keputusan pimpinan SKPD/BUMD/Dinas Perpustakaan dan Arsip tentang Penetapan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip/penetapan Arsip yang akan dimusnahkan sesuai dengan kewenangannya;
 - e. berita acara pemusnahan Arsip; dan
 - f. daftar Arsip yang dimusnahkan.

Pasal45

- (1) Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip dilakukan terhadap Arsip yang:
 - a. memiliki nilai guna kesejarahan;
 - b. telah habis retensinya; dan/atau
 - c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA penciptaArsip.
- (2) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh SKPD dan BUMD.
- (3) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.

Pasal46

- (1) Arsip Statis yang diserahkan oleh Pencipta Arsip ke Dinas Perpustakaan dan Arsip harus autentik, terpercaya, utuh, dan dapatdigunakan.
- (2) Dalam hal Arsip Statis yang diserahkan tidak autentik dan terpercaya, maka Pencipta Arsip wajib melakukanautentikasi.
- (3) Apabila Pencipta Arsip tidak melakukan autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perpustakaan dan Arsip berwenang menolak penyerahan ArsipStatis.
- (4) Dalam hal Arsip Statis yang tidak diketahui penciptanya, autentikasi dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Pasal 47

- (1) Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip usul serah oleh Arsiparis

- di Unit Kearsipan II;
- b. penilaian oleh panitia penilai Arsip di SKPD dan BUMD terhadap Arsip usul serah;
 - c. pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip di SKPD dan BUMD kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip, bahwa Arsip yang akan diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan;
 - d. verifikasi dan persetujuan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - e. penetapan Arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan Pencipta Arsip di SKPD dan BUMD; dan
 - f. penyerahan Arsip Statis dari Pimpinan Pencipta Arsip di SKPD dan BUMD kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan disertai berita acara dan daftar Arsip yang diserahkan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan format dan media Arsip yang diserahkan.
- (3) Arsip yang tercipta dari pelaksanaan penyerahan Arsip meliputi:
- a. keputusan pembentukan panitia penilai Arsip di SKPD dan BUMD;
 - b. notulen rapat panitia penilai Arsip di SKPD dan BUMD pada saat melakukan penilaian;
 - c. surat pertimbangan dari panitia penilai Arsip di SKPD dan BUMD kepada pimpinan Pencipta Arsip di SKPD dan BUMD yang menyatakan bahwa Arsip yang diusulkan untuk diserahkan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan;
 - d. surat persetujuan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - e. surat pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip di SKPD dan BUMD bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan;
 - f. keputusan pimpinan Pencipta Arsip di SKPD dan BUMD tentang penetapan pelaksanaan penyerahan Arsip Statis /penetapan Arsip yang akan diserahkan;
 - g. berita acara penyerahan Arsip Statis; dan
 - h. daftar Arsip Statis yang diserahkan.
- (4) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan oleh Pencipta Arsip dan Dinas Perpustakaan dan Arsip serta diperlakukan sebagai Arsip Vital.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Arsip Statis

Paragraf 1
Tugas Dinas Perpustakaan dan Arsip

Pasal 48

- (1) Dalam mengelola Arsip Statis, Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. pengelolaan Arsip Inaktif yang retensinya paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - b. pengelolaan Arsip Statis yang berskala Daerah; dan
 - c. pembinaan Kearsipan dilingkungan Daerah.
- (2) Pengelolaan Arsip Statis meliputi:
 - a. akuisisi Arsip Statis;
 - b. pengelolaan Arsip Statis;
 - c. preservasi Arsip Statis; dan
 - d. akses Arsip Statis.

Paragraf 2
Akuisisi Arsip Statis

Pasal 49

- (1) Akuisisi Arsip Statis hanya dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan melalui verifikasi secara langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Prosedur akuisisi Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. monitoring terhadap fisik Arsip dan daftar Arsip Statis;
 - b. melakukan verifikasi terhadap daftar Arsip Statis oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - c. menetapkan status Arsip Statis oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 - d. persetujuan untuk menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip di SKPD dan BUMD;
 - e. penetapan Arsip Statis yang diserahkan oleh pimpinan Pencipta Arsip di SKPD dan BUMD; dan
 - f. pelaksanaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip di SKPD dan BUMD kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan disertai dengan berita acara dan daftar Arsip Statis yang diserahkan.

- (3) Pelaksanaan akuisisi Arsip Statis wajib dituangkan dalam berita acara serah terima dan daftar Arsip Statis dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dan pimpinan Pencipta Arsip di SKPD dan BUMD;
- (4) Berita acara serah terima Arsip Statis paling sedikit memuat:
 - a. waktu serahterima;
 - b. tempat;
 - c. jumlah;
 - d. tanggung jawab dan kewajiban para pihak; dan
 - e. tanda tangan para pihak.
- (5) Daftar Arsip Statis paling sedikit memuat metadata sebagai berikut:
 - a. Pencipta Arsip;
 - b. nomor Arsip;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi Arsip;
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah Arsip; dan
 - g. keterangan.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka penyelamatan Arsip Statis, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip dapat memberi penghargaan atau imbalan kepadamasyarakat.
- (2) Penghargaan diberikan kepada masyarakat yang memberitahukan keberadaan dan/atau menyerahkan Arsip Statis yang masuk dalam DPA kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- (3) Imbalan diberikan kepada masyarakat yang menyerahkan Arsip Statis yang dimiliki atau dikuasai kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip yang pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkanperundingan.
- (4) Penghargaan dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan sarana Kearsipan; dan/atau
 - c. kompensasi berupa uang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan imbalan sebagaimana diatur pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf3
Pengolahan Arsip Statis

Pasal 51

Pengolahan Arsip Statis dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip berdasarkan asal usul dan asas aturan asli serta standar deskripsi Arsip Statis.

Pasal 52

- (1) Pengolahan Arsip Statis dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. menata informasi Arsip Statis;
 - b. menata fisik Arsip Statis; dan
 - c. penyusunan sarana bantu temu balik Arsip Statis.
- (2) Arsip Statis pada saat diserahkan atau diakuisisi tidak dilengkapi dengan daftar Arsip Statis.
- (3) Sarana bantu temu balik meliputi:
 - a. guide;
 - b. daftar Arsip Statis;
 - c. DPA melalui aplikasi atau software; dan
 - d. inventaris Arsip.
- (4) Daftar Arsip Statis yang dimuat dalam SIKK dan JIKK sekurang-kurangnya memuat metadata informasi Arsip:
 - a. Pencipta Arsip;
 - b. nomor Arsip;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi Arsip;
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah Arsip; dan
 - g. keterangan.

Paragraf4
Preservasi Arsip Statis

Pasal 53

- (1) Preservasi Arsip Statis dilaksanakan dengan cara preventif dan kuratif oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk menjamin keselamatan dan kelestarian Arsip.

- (2) Preservasi Arsip Statis dilaksanakan dengan cara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyimpanan;
 - b. pengendalian hama terpadu;
 - c. reproduksi; dan
 - d. perencanaan terhadap bencana.
- (3) Preservasi Arsip Statis dilaksanakan dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perawatan Arsip Statis dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung Arsip Statis tersebut.

Paragraf 5

Akses Arsip Statis

Pasal 54

- (1) Akses Arsip Statis dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip dalam rangka pendayagunaan dan pelayanan publik.
- (2) Akses Arsip Statis untuk pengguna Arsip dijamin oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- (3) Untuk menjamin kepentingan akses Arsip Statis, Dinas Perpustakaan dan Arsip menyediakan sarana dan prasarana akses Arsip Statis.
- (4) Akses Arsip Statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip Statis; dan
 - b. sifat keterbukaan dan tertutupan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Akses Arsip Statis dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (6) Apabila akses Arsip Statis yang berasal dari Pencipta Arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari Pencipta Arsip yang memiliki Arsip tersebut.

Bagian Keempat
Autentikasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip melakukan kegiatan alih media dalam rangka pelestarian dan pelayanan Arsip Statis.
- (2) Pelaksanaan alih media harus disertai dengan autentikasi dan dukungan pembuktian untuk menjamin keaslian Arsip.

Paragraf2
Alih Media

Pasal 56

- (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip menyediakan sarana dan prasarana alih media serta dapat menyediakan laboratorium untuk autentikasi Arsip.
- (2) Alih media dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip nilai informasi, keamanan informasi, keselamatan kondisi fisik Arsip, efisiensi, serta ketersediaan teknologi akses dan perawatannya.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan alih media dilakukan dengan membuat berita acara dan daftar Arsip yang akan dialihmediakan.
- (2) Berita acara alih media Arsip Statis paling sedikit memuat:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat pelaksanaan;
 - c. jenismedia;
 - d. jumlah Arsip yang dialihmediakan;
 - e. keterangan tentang Arsip yang dialihmediakan;
 - f. keterangan proses alih media yangdilakukan;
 - g. pelaksana; dan
 - h. tanda tangan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- (3) Daftar Arsip yang dialih mediakan paling sedikit memuat:
 - a. Pencipta Arsip;
 - b. nomor urutan;

- c. jenis Arsip;
- d. jumlah Arsip;
- e. kurun waktu; dan
- f. keterangan.

Paragraf 3

Autentikasi Alih Media

Pasal 58

- (1) Hasil alih media Arsip Statis ditetapkan autentikasinya oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dan menjadi alat bukti yang sah.
- (2) Dalam menetapkan autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Arsip dapat berkoordinasi dengan pihak yang mempunyai kemampuan dan kompetensi.
- (3) Sebelum penetapan autentikasi dilakukan pengujian terhadap isi, struktur, dan konteks Arsip Statis.
- (4) Pengujian dilakukan oleh:
 - a. tim ahli;
 - b. pihak yang memiliki kemampuan dan kompetensi; dan
 - c. laboratorium.
- (5) Autentikasi dilaksanakan dengan memberikan tanda dan/atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (6) Pencipta Arsip atau masyarakat di Daerah dapat mengajukan permintaan autentikasi kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.

BAB V

PEMBINAAN KEARSIPAN

Pasal 59

Pembinaan Kearsipan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kearsipan dalam kerangka SKK dan SKN pada setiap Pencipta Arsip dan Dinas Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang Kearsipan.

Pasal 60

- (1) Pembinaan Kearsipan di wilayah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip.
- (2) Pembinaan Kearsipan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggara Kearsipan di wilayah Daerah;
 - b. pemberian pedoman dan standar Kearsipan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan Kearsipan;
 - d. sosialisasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. perencanaan, penelitian, pengembangan pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. akreditasi dan sertifikasi.
- (3) Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Unit Kearsipan II bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan Arsip Aktif di lingkungan Pencipta Arsip secara berjenjang.

Pasal 61

Dalam rangka perlindungan kepentingan Daerah dan hak-hak keperdataan rakyat, Dinas Perpustakaan dan Arsip bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pembinaan Kearsipan terhadap lembaga swasta dan masyarakat yang melaksanakan kepentingan publik.

Pasal 62

- (1) Pengawasan Kearsipan meliputi pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan BUMD dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal BUMD.

BAB VI
SIKK DAN JIKK

Bagian Kesatu
Pembangunan SIKK dan JIKK

Paragraf 1
Pembangunan SIKK

Pasal 63

- (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip bertanggung jawab membangun dan mengelola SIKK yang merupakan sistem informasi Kearsipan di Daerah.
- (2) Pembangunan SIKK dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan kebijakan SIKK; dan
 - b. penyelenggaraan SIKK.
- (3) Penetapan kebijakan SIKK meliputi:
 - a. kebijakan dalam penyediaan informasi Kearsipan; dan
 - b. kebijakan dalam penggunaan informasi Kearsipan.
- (4) Pembangunan SIKK merupakan kelanjutan dari pembangunan SKK.
- (5) SIKK merupakan bagian dari SIKN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis SIKK diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembangunan JIKK

Pasal 64

- (1) JIKK merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan untuk:
 - a. Arsip Dinamis; dan
 - b. Arsip Statis.
- (2) JIKK merupakan simpul jaringan Kearsipan Daerah dan merupakan bagian dari JIKN yang merupakan pusat jaringan nasional pada ANRI.
- (3) Simpul jaringan Kearsipan Daerah bertanggung jawab atas:
 - a. penyediaan informasi Kearsipan yang disusun dalam daftar Arsip Dinamis dan dalam Arsip Statis;
 - b. penyampaian daftar Arsip Dinamis dan Statis kepada pusat jaringan

- nasional;
 - c. penyediaan akses dan layanan informasi Kearsipan; dan
 - d. evaluasi secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis JIKK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan Informasi Kearsipan

Pasal 65

- (1) Untuk meningkatkan manfaat Arsip bagi kesejahteraan masyarakat, JIKK digunakan sebagai wadah layanan informasi Kearsipan kepada pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Informasi Kearsipan paling sedikit memuat metadata Arsip meliputi:
- a. Pencipta Arsip;
 - b. nomor Arsip;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi;
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah; dan
 - g. keterangan.

BAB VII SUMBER DAYA PENDUKUNG

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Umum

Pasal 66

Sumber daya manusia Kearsipan terdiri atas pejabat struktural bidang Kearsipan, Arsiparis dan fungsional umum dibidang Kearsipan.

Pasal 67

- (1) Pejabat struktural dibidang Kearsipan mempunyai kedudukan sebagai tenaga manajerial yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan dalam hal melakukan perencanaan, penyusunan program, pengaturan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan sumber dayam manusia.
- (2) Arsiparis terdiri atas Arsiparis Pegawai Negeri Sipil dan Arsiparis non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Arsiparis PNS merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dibidang Kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arsiparis non PNS merupakan pegawai non PNS yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diangkat dan ditugaskan secara penuh melaksanakan kegiatan Kearsipan di lingkungan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Paragraf 2

Kedudukan Hukum dan Kewenangan

Pasal68

- (1) Arsiparis mempunyai kedudukan hukum sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
- (2) Fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dan BUMD sesuai dengankewenangannya;
 - b. menjaga ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 - c. menjaga terwujudnya pengelolaan Arsip yang handal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga keamanan dan keselamatan Arsip yang berfungsi untuk menjamin Arsip-Arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya;
 - e. menjaga keselamatan dan kelestarian Arsip sebagai bukti

pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- f. menjaga keselamatan aset Daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
- g. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya.

Pasal 69

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, Arsiparis mempunyai kewenangan:

- a. menutup penggunaan Arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna Arsip apabila dipandang pengguna Arsip dapat merusak keamanan informasi dan/ atau fisik Arsip;
- b. menutup penggunaan Arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna Arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- c. melakukan penelusuran Arsip pada Pencipta Arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta Arsip atau Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelamatan Arsip.

Paragraf 3

Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan

Pasal 70

Pendidikan dan pelatihan Kearsipan bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan semangat pengabdian untuk dapat melaksanakan tugas jabatan dibidang Kearsipan;
- b. menciptakan sumber daya manusia Kearsipan yang memenuhi persyaratan kompetensi dibidang Kearsipan; dan
- c. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas dibidang Kearsipan.

Pasal 71

- (1) Pendidikan dan pelatihan teknis Kearsipan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melakukan Kearsipan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan teknis Kearsipan dapat diselenggarakan secara berjenjang.
- (3) Pendidikan dan pelatihan teknis Kearsipan diikuti oleh:
 - a. pegawai negeri sipil yang akan atau telah menduduki jabatan yang fungsi, tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan Kearsipan;
 - b. pejabat struktural dibidang Kearsipan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan teknis Kearsipan dapat diikuti oleh pegawai BUMD.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 72

- (1) Pengelolaan Arsip dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana berdasarkan standar yang ditetapkan oleh ANRI.
- (2) Sarana dan prasarana meliputi:
 - a. gedung;
 - b. ruang; dan
 - c. peralatan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi.
- (3) Persyaratan sarana dan prasarana pada ayat (2) mengatur lokasi, konstruksi, tata ruang, persyaratan utilitas dan peralatan pengelolaan Arsip.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 73

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kearsipan digunakan untuk:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Kearsipan;
 - b. pembinaan dan pengelolaan Kearsipan;

- c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. tunjangan profesi; dan
 - f. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Kearsipan yang diselenggarakan oleh BUMD dialokasikan dalam anggaran BUMD.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 74

- (1) Perseorangan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kearsipan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam ruang lingkup:
- a. pengelolaan Arsip;
 - b. penyelamatan Arsip;
 - c. penggunaan Arsip;
 - d. penyediaan sumber daya pendukung; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Peran serta dalam pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menciptakan Arsip atas kegiatan yang dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak keperdataan dan hak atas kekayaan intelektual serta mendukung ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara; dan
- b. menyimpan dan melindungi Arsip perseorangan, keluarga, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan masing-masing sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Peran serta dalam penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. menyerahkan Arsip Statis kepada lembaga Kearsipan;
- b. melaporkan kepada lembaga Kearsipan apabila mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan Arsip oleh SKPD/unit kerja dan BUMD tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. melindungi dan menyelamatkan Arsip dan tempat penyimpanan Arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait.

Pasal 77

Peran serta dalam penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pembudayaan penggunaan dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan prosedur yang benar.

Pasal 78

Peran serta dalam penyediaan sumber daya pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. menggalang dan/atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan Kearsipan;
- b. melakukan pengawasan penyelenggaraan Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan Arsip sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Kearsipan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. pimpinan Unit Kearsipan yang belum memiliki kompetensi dibidang Kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan Unit Kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Unit Kearsipan dan unit Pengolah yang belum memiliki Arsiparis, untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan Kearsipan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pimpinan Pencipta Arsip dan Pemerintah Daerah harus mencukupi kebutuhan akan Arsiparis di Unit Kearsipan dan unit Pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 20 Maret 2020



Diundangkan di Langara
pada tanggal 20 Maret 2020



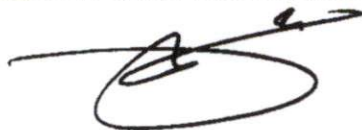
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 10 / 17 / 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



TAKDIR, SH.
NIP. 19840906 200903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

I. UMUM

Arsip yang dimiliki Daerah merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, antara lain dapat menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan Kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, perlu dibangun sistem Kearsipan Daerah, meliputi pengelolaan Arsip Dinamis dan pengelolaan Arsip Statis. Sistem Kearsipan Daerah adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga sistem Kearsipan Daerah berfungsi menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, serta mampu mengidentifikasi keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi Kearsipan.

Untuk menunjang sistem Kearsipan Daerah, akan dibangun sistem informasi Kearsipan Kabupaten Konawe Kepulauan dan jaringan informasi Kearsipan Kabupaten Konawe Kepulauan, yang merupakan bagian dari sistem informasi Kearsipan nasional dan jaringan informasi Kearsipan nasional. Sistem informasi Kearsipan Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan suatu sistem informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Konawe Kepulauan yang menggunakan sarana jaringan informasi Kearsipan Kabupaten Konawe Kepulauan. Sedangkan jaringan informasi Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang akan digunakan sebagai wadah

layanan informasi Kearsipan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan masyarakat.

Berdasar latar belakang sebagaimana tersebut diatas, serta sejalan dengan berlakunya undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan serta peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kearsipan.

II. PASAL DEMIPASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
huruf a : Cukup jelas
huruf b : Cukup jelas
huruf c : Cukup jelas
huruf d : Cukup jelas
huruf e : Cukup jelas
huruf f : Cukup jelas
huruf g :

Yang dimaksud dengan perlindungan dan penyelamatan Arsip adalah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan Arsip yang dinyatakan sebagai Arsip milik Daerah, baik terhadap Arsip yang keberadaanya didalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban Daerah dari kemungkinan kehilangan, kerusakan Arsip yang disebabkan oleh factoralam, biologi, fisika dan tindakan terorisme, spionase, sabotase, perangan perbuatan vandalisme lainnya. Pelindungan dan

penyelamatan dilakukan baik bersifat preventif maupun kuratif.

huruf h : Cukup jelas

huruf i : Cukup jelas

huruf j : Pendanaan yang dibutuhkan untuk Penyelenggaraan Kearsipan bersumber dari APBD, bantuan luar negeri, dan/atau bantuan masyarakat.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) :

JRA fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis Arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif antara lain keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, dan ketatausahaan. JRA substantive adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis Arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap Pencipta Arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) :

Yang dimaksud dengan registrasi adalah tindakan Pencatatan terhadap penciptaan Arsip yang merupakan bagian dari tahapan kegiatan pengurusan surat

Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan tindakan pengendalian adalah Suatu sarana pencatatan yang dilakukan untuk mengetahui posisi dan tindak lanjut dari Arsip yang telah didistribusikan. Dilakukan oleh unit Pengolah dan unit Kearsipan sesuai kewenangan baik dengan sarana manual maupun elektronik. Tindakan pengendalian merupakan bagian tahapan dari kegiatan pengurusan surat.

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Penggunaan Arsip Dinamis dilakukan untuk memenuhi kepentingan dalam kegiatan

perencanaan, pengambilann keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak, atau penyelesaian sengketa.

Ayat (2) :

Tanggung jawab terhadap autentitas Arsip yang dibuat dibuktikan dengan cara pemberian tanda tangan atauparaf oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Ayat (1) :

Pengaturan fisik, pengolahan informasi Arsip, Dan penyusunan daftar Arsip inaktif dimaksudkan untuk memudahkan penemuan kembali.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1) :

Penyimpanan Arsip Aktif dilakukan pada sentral Arsip Aktif atau central file sebagai tempat penyimpanan Arsip Aktif yang dirancang untuk penyimpanan Arsip secara efisien, efektif, dan aman. Penyimpanan Arsip Inaktif dilakukan pada sentral Arsip Inaktif atau records center sebagai tempat penyimpanan Arsip Inaktif pada bangunan yang dirancang untuk penyimpanan Arsip.

- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 37 :

- Ayat (1) :
Alih media Arsip dalam rangka pemeliharaan Arsip Dinamis dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan Arsip yang dialih mediakan.

- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) :

Yang dimaksud dengan memberikan tanda tertentu adalah memberikan paraf atau tanda tangan secara manual atau elektronik terhadap Arsip hasil alih media.

- Ayat (7) : Cukup jelas
- Ayat (8) : Cukup jelas
- Ayat (9) : Cukup jelas
- Ayat (10) : Cukup jelas
- Ayat (11) : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 :

- Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) :

- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d :

Bahwa Arsip yang akan dimusnahkan tidak berkaitan dengan perkara yang masih dalam proses hukum.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 42 :

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan penyeleksian Arsip adalah kegiatan penilaian untuk memastikan bahwa Arsip yang diusulkan musnah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, tidak ada peraturan yang melarang dan tidak berkaitan dengan perkara yang masih dalam proses.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 :

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa Arsip yang diserahkan adalah asli. Apabila yang diserahkan berupa kopi Arsip, pimpinan Pencipta Arsip menjamin dengan membuat surat pernyataan bahwa kopi Arsip sesuai naskah asli.

- Huruf d :
Verifikasi dilakukan oleh lembaga Kearsipan untuk menentukan bahwa Arsip yang diserahkan adalah Arsip Statis
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 :
Yang dimaksud dengan “standar deskripsi Arsip Statis” adalah ketentuan dasar dalam mendeskripsikan/merekam informasi Arsip Statis.
- Pasal 52 :
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) :
Huruf a :
Yang dimaksud dengan guide adalah sarana bantu penemuan Arsip Statis berupa uraian informasi mengenai khasanah Arsip Statis yang tersimpan baik secara keseluruhan maupun tematis di lembaga Kearsipan.
- Huruf b :
Yang dimaksud dengan “daftar Arsip Statis” adalah sarana bantu penemuan Arsip Statis berupa uraian deskripsi informasi yang paling sedikit memuat nomor Arsip, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu penciptaan, tingkat perkembangan, jumlah, dan kondisi Arsip
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d :
Yang dimaksud dengan “inventaris Arsip” adalah

sarana bantu penemuan kembali Arsip Statis berupa uraian deskripsi informasi yang disusun berdasarkan skema pengaturan Arsip yang dilengkapi dengan sejarah dan fungsi/peran Pencipta Arsip, riwayat Arsip, sejarah penataan Arsip, tanggung jawab teknis penyusunan, indeks, daftar istilah asing, struktur organisasi untuk Arsip kelembagaan atau riwayat hidup untuk Arsip perseorangan, dan *konkordan* (petunjuk perubahan terhadap nomor Arsip pada inventaris Arsip yang lama kedalam inventaris Arsip yang baru).

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 50 : Cukup jelas

Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52 : Cukup jelas

Pasal 53 : Cukup jelas

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 : Cukup jelas

Pasal 56 : Cukup jelas

Pasal 57 : Cukup jelas

Pasal 58 : Cukup jelas

Pasal 59 : Cukup jelas

Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61 :

Yang dimaksud dengan lembaga swasta dan masyarakat adalah pelaksana kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Lembaga yang melaksanakan kepentingan public antara lain lembaga pendidikan swasta, Rumah Sakit swasta, dan kantornotaries.

Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal 64 : Cukup jelas

Pasal 65 : Cukup jelas

Pasal 66 : Cukup jelas

Pasal 67 : Cukup jelas

Pasal 68 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Arsiparis berpegang pada kompetensi yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan “independen” adalah bebas dari pengaruh pihak manapun dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan pada kaidah-kaidah Kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 69 : Cukup jelas

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “penugasan oleh pimpinan Pencipta Arsip atau kepala lembaga Kearsipan” adalah penugasan sesuai dengan wilayah kewenangan lembaga yang dimiliki oleh masing-masing pimpinan lembaga pencipta atau lembaga Kearsipan.

Pasal 70 : Cukup jelas

Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72 : Cukup jelas

Ayat (1) :

Standar sarana berupa bangunan gedung penyimpanan Arsip dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Ayat (2) :

Gedung, ruangan, dan peralatan digunakan Untuk Mengelola Arsip Dinamis maupun Arsip Statis

dalam berbagai bentuk dan media, seperti: penyimpanan Arsip Aktif, penyimpanan Arsip Inaktif, penyimpanan Arsip Statis, peralatan Kearsipan, gedung penyimpanan Arsip, penyimpanan Arsip Vital, penyelamatan Arsip, dan system jaringan informasi dan komunikasi.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 73 : Cukup jelas
Pasal 74 : Cukup jelas
Pasal 75 : Cukup jelas
Pasal 76 : Cukup jelas
Pasal 77 : Cukup jelas
Pasal 78 : Cukup jelas
Pasal 79 : Cukup jelas
Pasal 80 : Cukup jelas
Pasal 81 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 53